

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah merupakan bangunan yang memiliki peran yang sangat penting sebagai tempat hunian dan berkumpulnya suatu keluarga. Harapan memiliki rumah yang layak huni merupakan dambaan setiap orang, namun keinginan memiliki rumah yang layak bagi beberapa orang harus terpendam disebabkan oleh faktor kemiskinan. Untuk mewujudkan harapan masyarakat pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan bedah rumah. Bantuan bedah rumah merupakan kegiatan dengan cara memperbaiki rumah masyarakat yang tak layak huni menjadi hunian yang layak untuk ditinggali.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Solok mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman. Dalam penyeleksian masyarakat harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, program ini memberikan bantuan berupa uang tunai kepada calon penerima bantuan kemudian dilakukan pembelian material bangunan. Pemilihan calon masih rumit dilakukan karena fakta yang terjadi di lapangan adalah pemilihan warga yang berhak mendapat bantuan renovasi rumah masih bersifat *subjektif*, terdapat perbedaan persepsi antara petugas dengan kriteria masyarakat yang berhak akan menerima bantuan dan pengolahan data saat penyeleksian membutuhkan waktu yang lama. Dengan membangun sistem penerimaan bantuan perbaikan rumah dengan menerapkan metode sistem

pendukung keputusan merupakan media yang tepat untuk mengimplementasikan sebuah sistem informasi tersebut.

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau *Decision Support System* (DSS) adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi terstruktur dan tak terstruktur. Sistem pendukung keputusan biasanya dibangun untuk mendukung solusi atau suatu masalah untuk mengevaluasi suatu peluang. Salah satu metode yang ada pada sistem pendukung keputusan adalah *Multi Objective Optimization on the basis of Ratio Analysis* (MOORA) merupakan metode *multiobjektif* sistem mengoptimalkan dua atau lebih atribut yang saling bertentangan secara bersamaan. Metode ini diterapkan untuk memecahkan masalah dengan perhitungan matematika yang kompleks dan sederhana dengan tingkat selektifitas yang baik dalam menentukan suatu alternatif (Irwana et al., 2018).

Untuk menangani kendala terjadinya kesalahan yang telah dijelaskan di atas. Dinas Perkim Kota Solok memerlukan sebuah sistem informasi yang dapat membantu dan mempermudah dalam pemilihan calon penerima bantuan. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mengangkat judul “***IMPLEMENTASI SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH DENGAN METODE MOORA PADA KOTA SOLOK***”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode MOORA dalam proses seleksi penerimaan bantuan perbaikan rumah dapat memudahkan Dinas perkim Kota Solok?
2. Bagaimana membangun sistem pendukung keputusan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL dapat menghasilkan laporan penerimaan bantuan perbaikan rumah cepat, tepat dan akurat?

1.3. Batasan Masalah

Agar masalah yang akan dibahas tidak meluas, dan pembahasan permasalahan yang dihadapi tidak menyimpang dari tujuan yang diharapkan, maka perlu ditetapkan batasan masalah yaitu:

1. Sistem pendukung keputusan dibuat untuk menentukan penerima bantuan perbaikan rumah pada Dinas Perkim Kota Solok.
2. Sistem pendukung keputusan dibuat dengan menerapkan metode MOORA.
3. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan sistem ini adalah PHP dan Database MySQL.

1.4. Hipotesa

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka penulis membuat suatu hipotesa (dugaan Sementara) untuk mengatasi permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan menerapkan sistem pendukung keputusan menggunakan metode MOORA pada proses seleksi penerimaan bantuan perbaikan rumah dapat memudahkan Dinas Perkim Kota Solok dalam menentukan calon

penerima yang berhak menerima bantuan dengan cepat, tepat pada Sasarannya.

2. Diharapkan dengan membangun sistem pendukung keputusan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL dapat menghasilkan laporan penerima bantuan perbaikan rumah secara cepat, tepat dan akurat.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui nilai akhir dari proses perhitungan pada metode MOORA.
2. Merancang dan membuat sistem pendukung keputusan dalam penerimaan perbaikan rumah dengan memberikan masukan kepada instansi dalam menentukan calon penerima bantuan.
3. Untuk memudahkan dan mengetahui hasil yang lebih objektif dan akurat dalam pengambilan keputusan kepada warga yang berhak menerima bantuan.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas melatih dalam berpikir secara sistematis dan ilmiah, serta mengembangkan kemampuan untuk melakukan analisis terhadap masalah yang lebih kritis.

2. Instansi

Manfaat penelitian skripsi adalah untuk membantuk pihak instansi dalam mengambil keputusan untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan bantuan

penerima perbaikan rumah dengan melihat nilai dari beberapa kriteria yang sudah ditetapkan.

3. Pembaca

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.7. Tinjauan Umum Instansi

Disini penulis menjelaskan gambaran umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Solok sebagai berikut:

1.7.1. Sejarah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Solok

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Solok dahulunya merupakan bagian dari Dinas Pekerja Umum (PU). Dinas PU berada di bawah naungan Kementarian Pekerjaan Umum Sumatera Barat, serta di bawah naungan Kementrian Dinas PU dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Dinas PU membidangi dalam urusan pekerjaan Cipta Karya, Bina Marga dan Pengairan atau Irigasi. Sejak tanggal 2 Januari 2017 pekerjaan dibidang Cipta Karya berubah menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PERKIM). Dinas Perkim membidangi 3 bagian yaitu, Bidang Penyelenggara, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Perumahan Rakyat. Berdasarkan peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pecegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman pada Kota Solok. Tugas pokok Dinas Perkim untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan di Kota Solok. Dinas Perkim berada

di Jalan Dr.Hamka Lukah Pandan, Kelurahan KTK, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman saat ini dijabat oleh Jusmardi, S.Pd.

1.7.2. Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Solok

Setiap Instansi Pemerintah memiliki visi dan misi agar dapat menjadi lebih baik kedepannya. Adapun visi dan misi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan di Kota Solok tahun 2026.

2. Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok

- a.** Mewujudkan peningkatan pembangunan prasarana dan sarana publik yang berkualitas.
- b.** Mewujudkan ketersediaan rumah yang layak huni dengan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan permukiman yang memadai.

1.7.3. Struktur Organisasi

Sebagaimana biasanya setiap instansi pemerintah selalu memperhatikan struktur organisasinya dalam melaksanakan aktivitas, karena setiap struktur organisasi tersebut menggambarkan tentang tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas masing-masing dan menentukan bagian-bagian pekerjaan serta merupakan suatu alat untuk memberikan wewenang dan tanggung jawab seorang pemimpin dalam menjalankan organisasi dan hubungan kerja antara atasan dan bawahan. Dengan adanya struktur organisasi maka hasil yang di harapkan oleh

perusahaan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kota Solok memiliki Struktur Organisasi dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber : Dinas Perkim Kota Solok

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Perkim Kota Solok

1.7.3.1 Tugas dan wewenang karyawan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dijelaskan tugas dan wewenang masing-masing bagian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris

Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian dan

pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan urusan Pemerintahan.

2. Sekretaris

Membantu Kepala Dinas melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan evaluasi dan pelaporan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan aset Dinas.

4. Sub Bagian Program Keuangan

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan pengelolaan keuangan.

5. Kabid Penyelenggara Bangunan

Membantu Kepala Dinas merencanakan perumusan kebijakan melaksanakan program dalam penataan bangunan dan lingkungan.

a. Kasi Perencanaan Bangunan

Membantu merencanakan kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis perumahan berdasarkan rencana operasional bidang perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. Kasi Bangunan Pemerintah

Melaksanakan penyelenggaraan bantuan pembangunan perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

c. Kabid Bangunan Publik

Membantu Kepala Dinas dalam pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta

peningkatan mutu bangunan.

6. Kabid Perumahan dan Permukiman

a. Membantu Kepala Dinas dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring pelaksanaan dan program kegiatan perencanaan dan pengawasan.

b. Kasi Perumahan

Membantu dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan serta evaluasi program pada penyediaan dan pembangunan perumahan.

c. Kasi Saluran dan Lingkungan

Melakukan program pembersihan drainase diberbagai wilayah permukiman agar tidak terjadi penyumbatan saluran air.

d. Kasi Jalan dan Lingkungan

Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan dengan jalan lingkungan.

7. Kabid Penyehatan Lingkungan Permukiman

a. Kasi Perencanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Membantu dalam melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di penataan Penyehatan Lingkungan.

b. Kasi Air Minum

Melakukan kegiatan PLP dan Air Minum berdasarkan rencana operasional bidang Infrastruktur dalam pedoman pelaksanaan.

c. Kasi Sanitasi

Merencanakan menyusun dan melaksanakan program dalam pelaksanaan Sanitasi dan Air Bersih.